

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan konflik yang telah berlangsung cukup lama dan mencakup beragam aspek seperti, ekonomi, militer, dan teknologi. Kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1970-an menjadi salah satu hal yang cukup memberikan tamparan bagi AS selaku negara adidaya tunggal yang ada pasca perang dingin (Petrus, 2020). Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang menjadi poros oleh negara-negara lain, baik dalam hal ekonomi, teknologi maupun militer. Namun semenjak memasuki abad ke 21, telah hadir pesaing baru yang oleh Presiden AS, Donald Trump disebut sebagai pesaing strategis yakni, Tiongkok (Sevastopulo, 2017).

Kemajuan Tiongkok dalam berbagai bidang dilihat sebagai ancaman bagi AS. Kekuatan yang dibangun oleh Tiongkok tidak hanya berfokus pada wilayah Asia Timur atau Indo Pasifik, melainkan mulai merambah ke skala internasional yang lebih luas. Tidak jarang ditemukan dalam beberapa sumber yang menyebutkan kebangkitan atau kemajuan Tiongkok sebagai pesaing baru AS dapat mengarah pada konflik dunia yang besar. Terbukti kedua negara sering bersitegang dalam beberapa momen salah satunya perang dagang yang berlangsung sejak 2018 (RI, 2025). Perang dagang antara dua otoritas global ini memiliki dampak besar pada lanskap ekonomi

dan politik global, khususnya di Asia Tenggara dan negara-negara anggota ASEAN (Coxhed, 2022).

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika geopolitik global semakin kompleks dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang menantang dominasi tradisional negara-negara barat. Salah satu entitas yang berperan dalam perubahan ini adalah BRICS, sebuah blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sebagai organisasi negara berkembang, BRICS berupaya menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, terutama dengan menyaingi lembaga-lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia (Fiskal, 2025).

Kehadiran BRICS telah membawa dampak besar dalam hubungan internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi arena penting dalam persaingan global (Setiawan, 2025). Sejak didirikan, BRICS telah memainkan peran penting dalam mendefinisikan ulang tatanan ekonomi dan politik global, BRICS dipandang sebagai representasi dari aspirasi negara-negara *Global South* untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih multipolar, adil, dan seimbang terhadap dominasi institusi internasional yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya (Firmansyah, Afif, Heryadi, & Sari, 2024).

Asia Tenggara merupakan wilayah strategis yang memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi yang tinggi. Kawasan yang secara geografis, ekonomi, dan politik berada di posisi krusial dalam arsitektur Indo-Pasifik, kini menjadi salah satu medan strategis rivalitas baru ini (Setiawan, 2025).

Dengan letak geografisnya yang berada di jalur perdagangan utama dunia, kawasan ini menjadi pusat perhatian bagi berbagai kekuatan global, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat telah lama memiliki pengaruh di kawasan ini melalui aliansi keamanan dan kebijakan ekonomi, sementara Tiongkok semakin memperkuat posisinya dengan inisiatif ekonomi seperti *Belt and Road Initiative (BRI)* dan *China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)* (Alfi, Muawal, & Ismail, 2023).

Kehadiran BRICS di Asia Tenggara dapat menjadi faktor baru dalam mempengaruhi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. BRICS, dengan kepemimpinan ekonomi yang didominasi oleh Tiongkok dan Rusia, memberikan alternatif bagi negara-negara Asia Tenggara dalam menjalin kerja sama ekonomi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan membuka peluang bagi model kerja sama multipolar di kawasan ini. Namun, di sisi lain, peningkatan pengaruh BRICS juga dapat memperuncing ketegangan antara Washington dan Beijing, terutama dalam isu-isu strategis seperti ekonomi dan politik regional.

Tiongkok memanfaatkan BRICS sebagai alat diplomasi ekonomi dan simbol tatanan dunia multipolar, sementara AS memandang perkembangan ini sebagai tantangan terhadap pengaruh liberal-demokratisnya di kawasan ini. Kehadiran BRICS memperluas spektrum persaingan bukan hanya dalam dimensi bilateral AS-Tiongkok, tetapi juga dalam konteks koalisi multilateral yang dipersepsikan sebagai alternatif

terhadap dominasi Barat. Dalam konteks ini, rivalitas antara AS dan Tiongkok di Asia Tenggara tidak lagi sekedar bersifat bilateral, tetapi juga melibatkan pergeseran struktur kekuatan global yang dimediasi oleh forum-forum seperti BRICS.

Penting untuk melihat bagaimana hubungan yang dibangun oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dengan AS dan Tiongkok. Amerika Serikat membangun kekuatan dan hegemoni kekuasaannya dengan pengembangan keamanan melalui kerjasama yang dibangun, seperti latihan bersama dan turut menyuplai persenjataan di beberapa negara anggota, seperti di Filipina dan Vietnam (Chang, 2023). Sementara Tiongkok melalui jalur ekonomi terus memperkuat pengaruh di negara kawasan ini. Meskipun kerap terlibat dengan konflik laut china selatan dengan beberapa negara yang berbatasan, hubungan dan diplomasi ekonomi dengan Tiongkok tetap terjalin dengan baik.

Tiongkok, sebagai anggota paling berpengaruh dalam BRICS, memanfaatkan forum ini untuk memperluas visinya tentang dunia multipolar. Melalui jalur ini pula, Tiongkok mencoba memperluas pengaruhnya ke negara-negara Asia Tenggara, tidak hanya melalui hubungan bilateral, tetapi juga melalui kerja sama multilateral dengan BRICS. Negara-negara ASEAN yang sedang mencari diversifikasi kerja sama dan alternatif pembiayaan pembangunan mulai melihat BRICS sebagai salah satu pilihan strategis (Sundram, 2025). Di sisi lain, kehadiran dan aktivitas BRICS yang semakin intens di kawasan turut mendorong AS

untuk meningkatkan keterlibatannya, baik melalui pendekatan ekonomi maupun melalui peningkatan kerja sama keamanan dan militer di kawasan. Rivalitas ini pun tidak lagi sekedar bersifat bilateral (AS-Tiongkok), tetapi telah melibatkan dinamika forum multilateral yang kompleks, di mana BRICS berperan sebagai katalis atau akselerator dari ketegangan strategis tersebut.

Dalam konteks ini, kemunculan dan semakin aktifnya BRICS sebagai blok ekonomi-politik negara-negara berkembang membawa dimensi baru dalam dinamika rivalitas tersebut. Sejak awal berdirinya, BRICS memang berorientasi pada reformasi tatanan global yang dianggap terlalu didominasi oleh negara-negara Barat, khususnya AS dan Sekutunya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah ekspansi keanggotaannya dan penguatan institusi seperti *New Development Bank* (NDB), BRICS mulai tampil sebagai kekuatan geopolitik alternatif yang secara tidak langsung menantang dominasi AS (Setiawan, 2025).

Namun demikian, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana kehadiran BRICS secara spesifik mempengaruhi dinamika rivalitas AS dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Meskipun dinamika rivalitas antara AS dan Tiongkok ini telah menjadi salah satu trending topik dalam perbincangan studi hubungan internasional, akan tetapi kebanyakan diantaranya hanya berfokus pada aspek persaingan bilateral antara kedua negara besar tersebut. Fokus biasanya mencakup strategi militer, diplomasi ekonomi, dan perebutan pengaruh seperti melalui

kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)* oleh Tiongkok dan *Indo Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)* oleh AS. (Anam & Ristiyani, 2018) (Dwi Koestanto, 30 mei 2022).

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengulas terkait bagaimana Tiongkok menggunakan institusi BRICS sebagai platform untuk mempengaruhi atau menandingi kekuatan AS di Asia Tenggara. Kajian-kajian yang membahas terkait BRICS kebanyakan hanya membahas terkait peran kolektif yang dibangun oleh negara anggotanya dalam mendorong reformasi sistem global, menantang dominasi lembaga ekonomi barat seperti IMF dan *World Bank*, serta mendorong dedolarisasi sebagai alternatif sistem keuangan (Firmansyah, Afif, Heryadi, & Sari, 2024). Lebih lanjut, masih minim penelitian atau literatur yang menghubungkan terkait pengaruh BRICS dalam persaingan geopolitik AS-RRT di beberapa beberapa kawasan termasuk Asia Tenggara, padahal kawasan ini merupakan ruang strategis dalam perebutan pengaruh kedua negara besar tersebut (Coxhed, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana BRICS digunakan oleh Tiongkok untuk membangun kekuatan yang dapat menandingi AS dan analisisnya dalam memperkuat atau mengubah arah kontestasi strategis antara AS dan Tiongkok di Asia Tenggara. Sehingga penelitian ini kemudian hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan kerangka teoritik konsep *Soft Balancing*, dalam hal ini BRICS yang menjadi instrumen *Soft Balancing* oleh Tiongkok

dan Teori Stabilitas Hegemoni untuk menganalisis bagaimana kemudian persaingan kedua negara ini membawa posisi dilema bagi negara-negara di kawasan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulis menitikberatkan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kemudian Tiongkok melalui forum BRICS menyaingi kekuatan poros global yaitu Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara. Kemudian lanjut pada bagaimana persaingan dua blok ini mempengaruhi stabilitas kawasan regional Asia Tenggara. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana BRICS dapat mempengaruhi rivalitas antara RRT dan AS?
2. Bagaimana kehadiran BRICS dalam rivalitas AS-RRT dapat mempengaruhi stabilitas Kawasan Asia Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

- a) Untuk menganalisis bagaimana kemudian BRICS dapat mempengaruhi rivalitas antara AS dan Tiongkok.

- b) Untuk menganalisis bagaimana dampak rivalitas AS-RRT dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a) Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan dan lebih memperdalam lagi pengetahuan dan wawasan penulis terkait bagaimana kemudian kehadiran BRICS mampu menjadi promotor bagi Tiongkok untuk menandingi kekuatan liberal AS di Kawasan Asia Tenggara serta bagaimana pula rivalitas dua kekuatan besar ini mempengaruhi stabilitas Kawasan.
- b) Bagi Akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya literatur akademisi terkait rivalitas AS-Tiongkok dan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa HI terkait rivalitas kedua negara ini melalui kehadiran BRICS.

D. Kerangka Konseptual

Analisis kehadiran BRICS dalam meningkatkan rivalitas AS dan Tiongkok di Kawasan Asean menuntut kita untuk memahami kompleksitas persaingan antara kedua kekuatan besar ini serta dampaknya dalam tataran dunia. Dalam hal ini, penulis ingin mengantarkan kita untuk melihat rivalitas dua negara ini dengan pendekatan konsep *soft balancing* dan teori stabilitas hegemoni.

1. Konsep Soft Balancing

Konsep *Soft Balancing* merupakan salah satu konsep yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh BRICS dalam rivalitas Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok di Kawasan Asia Tenggara. Konsep yang berkembang dalam studi hubungan internasional ini merupakan bentuk strategi alternatif yang digunakan oleh negara-negara untuk menyeimbangkan dominasi kekuatan negara-negara besar tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung.

Berakhirnya perang dingin mengubah strategi *balancing* dari *Balance of Power* ke dalam beberapa varian strategi *balancing* (Paul T. , *Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy.*, 2005). Pasca Perang dingin, konsep *balance of power* dinilai tidak lagi memadai untuk menjelaskan perilaku negara. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem internasional yang dulunya bipolar menjadi unipolar. Sehingga untuk membentuk kemampuan dalam mengimbangi kekuatan negara adikuasa diperlukan strategi dan langkah-langkah baru yang bersifat non militer dan menghindari konfrontasi langsung. Salah satu varian *balancing* yang dimaksudkan adalah *soft balancing*.

Soft Balancing merupakan upaya yang digunakan untuk meredam dan membatasi ruang gerak negara dominan melalui upaya-upaya yang lebih diplomasi, aliansi dan institusi internasional

serta melalui kebijakan ekonomi (Paul T. , 2018). Pada dasarnya *soft balancing* merupakan strategi alternatif yang digunakan melalui cara-cara non-militer. Sementara itu, Robert Pape (2005) memaparkan *Soft Balancing* sebagai strategi non militeristik seperti melalui koalisi diplomatik, institusi internasional dan kebijakan ekonomi oleh negara-negara untuk menunda, memperumit, atau menggagalkan kebijakan luar negeri negara target yang dianggap merugikan mereka, tanpa membentuk aliansi militer formal atau melakukan konfrontasi langsung (Pape, 2005).

Dalam kaitannya dengan penelitian kali ini, upaya Tiongkok melalui BRICS sebagai sebuah institusi internasional merupakan sebuah strategi *soft balancing* untuk menandingi pengaruh dan kekuatan AS di kawasan asia tenggara. Melalui perluasan kerjasama ekonomi, investasi strategis, dan inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* yang kerap disandingkan dengan visi BRICS, Tiongkok membentuk kedekatan dengan negara-negara asia tenggara dan menawarkan alternative atas dominasi Washington.

Dengan demikian, kehadiran BRICS tidak hanya dapat dilihat sebagai forum ekonomi alternatif tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam persaingan global, khususnya di kawasan asia tenggara. Melalui BRICS, Tiongkok mampu secara sistematis memperluas pengaruhnya dan memperkuat strategi *soft balancing*-nya terhadap AS. Hal ini, pada gilirannya, telah memicu

peningkatan persaingan antara kedua negara di Asia Tenggara, karena negara-negara asia tenggara memiliki ruang manuver yang lebih besar dalam menanggapi kedua kekuatan ini.

Konsep ini kemudian relevan untuk melihat dan menganalisis pengaruh BRICS dalam rivalitas AS-RRT di Kawasan Asia Tenggara. Konsep *soft balancing* ini menjadi alat analisis yang penting untuk menganalisis bagaimana kehadiran BRICS tidak hanya memperkuat posisi Tiongkok dalam rivalitas global, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi dinamika rivalitas antara Tiongkok dan AS di Kawasan asia tenggara.

2. Teori Stabilitas Hegemoni

Teori stabilitas hegemoni (Hegemonic Stability Theory/HST) menyatakan bahwa keadaan sistem internasional cenderung lebih stabil jika ada satu kekuatan utama atau hegemon yang mampu menetapkan dan menerapkan norma-norma internasional. Hegemon tersebut berfungsi memberikan fasilitas publik internasional seperti keamanan, kestabilan moneter, dan tatanan perdagangan internasional. Namun, ketika hegemon mulai mengalami tantangan dari kekuatan baru yang tengah tumbuh (*Rising Power*), sistem internasional akan memasuki masa perpindahan yang ditandai oleh ketidakpastian dan peningkatan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. (Gilpin, 1981).

Dalam wilayah Asia Tenggara, Amerika Serikat telah berfungsi sebagai kekuatan utama selama bertahun-tahun berkat pengaruhnya dalam bidang ekonomi, militer, dan diplomasi. Namun, munculnya Tiongkok, terutama melalui platform alternatif seperti BRICS, telah menguatkan posisi Tiongkok sebagai penantang hegemoni. BRICS berperan sebagai alat strategis yang digunakan Tiongkok untuk melawan dominasi barat dalam sistem internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Melalui investasi, kerja sama, dan penguatan pengaruh politik, keberadaan BRICS menciptakan peluang baru bagi Tiongkok untuk memperluas kekuasaannya secara bersama-sama.

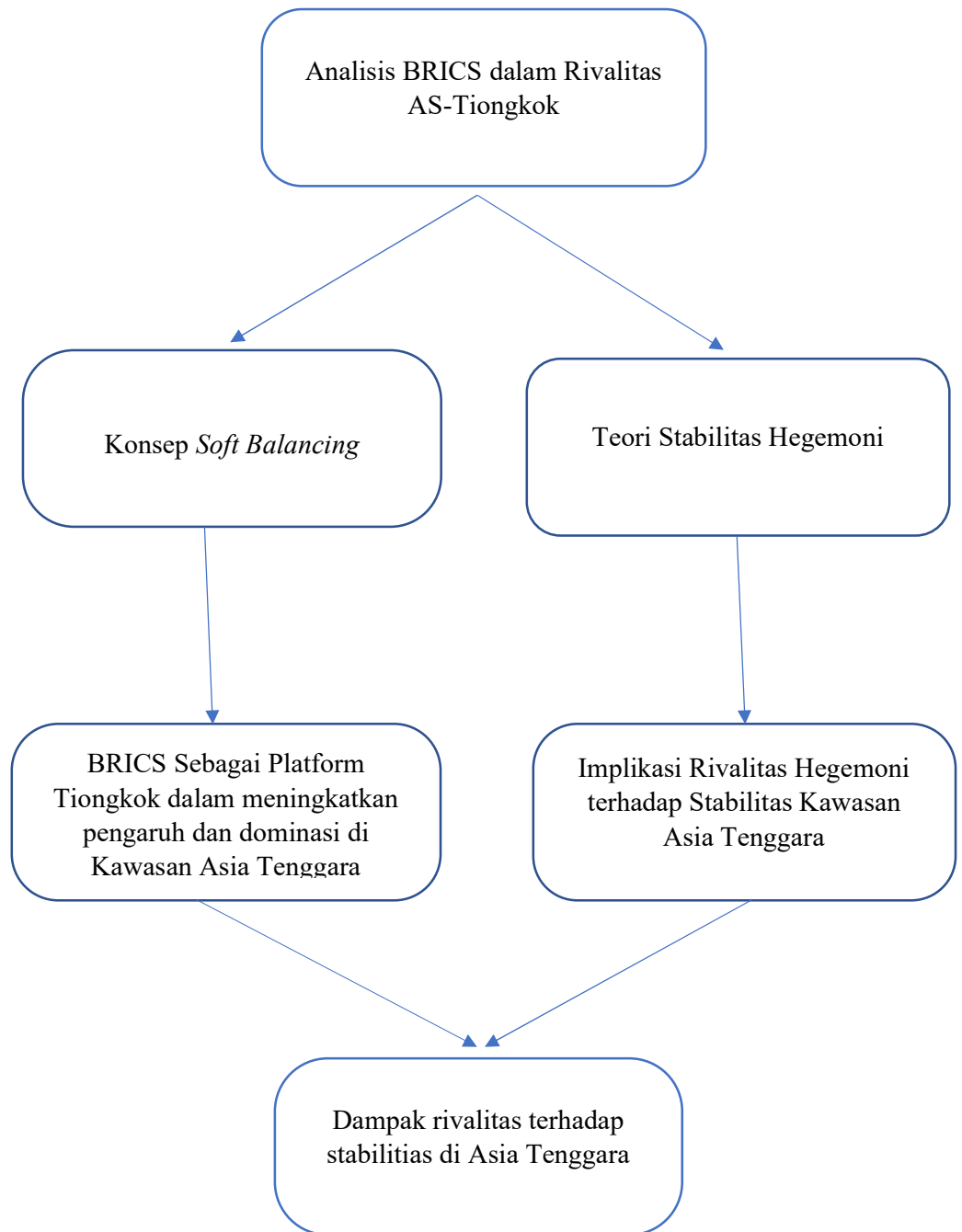
Dengan memakai lensa teori stabilitas hegemoni, dapat dinyatakan bahwa eksistensi BRICS telah menjadi faktor penting dalam transisi sistem internasional dari unipolar yang dipimpin oleh AS menuju struktur bipolar atau bahkan multipolar. Dalam konteks ini, Asia Tenggara berada pada posisi yang rentan dan strategis, dimana stabilitas kawasan sangat dipengaruhi oleh arah persaingan antara hegemon yang sudah ada (AS) dan kekuatan baru yang sedang tumbuh (Tiongkok).

lebih lanjut, negara-negara asia tenggara merespon dinamika ini secara strategis. Bagi negara-negara di Kawasan ini, menjaga hubungan yang seimbang dengan Tiongkok dan AS merupakan upaya untuk menghindari keberpihakan secara terbuka namun tetap

memaksimalkan manfaat dari kedua kekuatan besar ini. Dalam kerangka konsep stabilitas hegemoni, pendekatan ini mencerminkan upaya negara-negara kecil dan menengah untuk memposisikan diri terhadap pengaruh kekuatan-kekuatan besar ini dengan pilihan untuk berada pada posisi netral, mengikut kepada pada pendatang baru, atau memilih untuk tetap pada negara hegemon.

Kerangka konseptual ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam sistem internasional karena munculnya kekuatan baru bukan hanya menghasilkan kesempatan, tetapi juga menciptakan ketegangan yang perlu dihadapi dengan hati-hati oleh negara-negara di kawasan tersebut. Maka dari itu, penting untuk menganalisis keberadaan BRICS dalam konteks ini guna memahami dinamika kekuasaan global dan dampaknya terhadap struktur keamanan serta politik di Asia Tenggara.

Bagan 1. 1 Kerangka Analisis



Sumber : Peneliti 2025

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena kompleks yang melibatkan persaingan atau rivalitas antar dua kekuatan besar serta pengaruhnya terhadap Kawasan Asia Tenggara. Penelitian deskriptif-analitis cocok digunakan karena bertujuan untuk menggambarkan dampak persaingan AS-Tiongkok secara komprehensif, sekaligus menganalisis bagaimana kemudian kehadiran BRICS dalam mempertajam rivalitas antar kedua negara. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana wilayah asia tenggara menjadi terdampak sebagai wujud persaingan kedua negara di wilayah tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, laporan industri, dan dokumen kebijakan pemerintah. Selain itu, data kualitatif juga diambil dari artikel media terpercaya yang membahas perkembangan persaingan antara kedua negara di wilayah Asia Tenggara serta bagaimana kemudian kehadiran BRICS mempengaruhi persaingan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yang mencakup penelaahan berbagai sumber tertulis seperti jurnal akademik, buku, laporan industri, dokumen kebijakan pemerintah, dan artikel media. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai rivalitas AS-Tiongkok di Kawasan Asia Tenggara dan pengaruh BRICS dalam persaingan kedua negara tersebut. Sumber-sumber tersebut akan digunakan untuk menganalisis kebijakan, bentuk persaingan dan implikasi nyatanya di Kawasan Asia Tenggara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data dan fakta yang kemudian diolah yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kehadiran BRICS dalam mempengaruhi persaingan antar kedua negara di Kawasan Asia Tenggara.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dengan menyajikan teori dan konsep yang relevan terkait rivalitas AS-Tiongkok dan Peran

BRICS dalam mempengaruhi persaingan antar kedua negara serta dampaknya terhadap Kawasan Asean. Setelah itu, analisis akan dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini diuraikan menjadi lima bab, yaitu:

- a) **BAB 1 Pendahuluan**, menjadi bab yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, hingga sistematika penulisan penelitian.
- b) **BAB 2 Tinjauan Pustaka**, menjadi bab yang menjelaskan terkait teori dan konsep yang diterapkan dalam penelitian ini. Pertama adalah konsep *soft balancing* yang akan digunakan untuk melihat bagaimana BRICS digunakan oleh Tiongkok untuk membangun kekuatan dalam menandingi pengaruh dan dominasi AS. Kedua, Teori Stabilitas Hegemoni yang akan digunakan pula untuk membedah bagaimana kemunculan Tiongkok melalui platform BRICS dapat mempengaruhi stabilitas Kawasan Asia Tenggara dan bagaimana respon negara-negara di kawasan. Dalam bab ini juga akan dikaji mengenai penelitian terdahulu yang membantu

penelitian sekaligus membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu.

- c) **BAB 3 Gambaran Umum**, menjadi bab yang akan menjelaskan terkait penjelasan umum mengenai variabel penelitian yang akan dilaksanakan. Pertama, akan dijelaskan secara umum mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan BRICS. Kedua, akan dijelaskan secara umum bagaimana asia tenggara bisa menjadi arena strategis rivalitas AS dengan menjelaskan letak geopolitik, geostrategis dan geoekonomi Asia Tenggara serta Dominasi AS di Kawasan ini secara status quo.
- d) **BAB 4 Pembahasan**, menjadi bab yang akan menjelaskan hasil analisis dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisis yang akan dilakukan adalah terkait bagaimana kehadiran BRICS dalam rivalitas AS dan Tiongkok dengan pembabakan pertama melalui strategi *soft balancing* Tiongkok melalui platform BRICS untuk memperkuat pengaruh dan menyalurkan kepentingan nasionalnya. Kemudian lanjut pada implikasi yang dihadirkan dari persaingan dua kekuatan melalui dinamika persaingannya dan respon negara-negara asia tenggara atas gejolak atau instabilitas hegemoni yang ada di kawasan.
- e) **BAB 5 Kesimpulan** menjadi bab yang akan merangkum hasil penelitian yang menjawab keseluruhan pertanyaan penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Soft Balancing

Dalam pandangan kaum neorealis, dunia internasional merupakan sistem yang anarki, dan karenanya negara sebagai aktor memiliki ruang untuk bersaing dengan negara-negara lain sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Ruang persaingan yang terbuka dengan luas kemudian mengantarkan pada persaingan yang tidak sehat, mengingat ketiadaan otoritas global yang menyebabkan tidak adanya batasan negara dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya dan negara yang memiliki kemampuan atau kepemilikan terhadap akses yang lebih luas cenderung ingin melakukan dominasi terhadap negara lainnya (Waltz, 1979). Hal ini sebagai asumsi dasar realis bahwasanya negara merupakan aktor yang agresif dan cenderung egois (Jackson & Sorensen, 2014).

Di tengah sistem internasional yang anarki, stabilitas dan keamanan hanya bisa didapatkan ketika terdapat kekuatan yang berimbang (*balance of power*). Sehingga diperlukan upaya-upaya atau strategi *balancing* guna menjaga keamanan dan stabilitas global. Sejalan dengan perkembangan zaman, strategi *balancing* turut mengalami perkembangan. Konsep *balance of power* kemudian dikembangkan menjadi *balance of threat* untuk melihat posisi negara dalam lanskap internasional (Walt, 1985). Menurut Stephen M. Walt, negara cenderung membentuk aliansi untuk menghadapi ancaman

yang dirasakan bukan semata untuk melawan negara yang kuat secara militer.

Pasca perang dingin, *balance of power* juga dianggap tidak memadai untuk menjelaskan perilaku negara secara konkrit. Berakhirnya perang dingin mengantarkan pada perubahan struktur internasional yang dulunya bipolar menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *great power* di dunia (Baqi, 2022). Dengan demikian konsep *balancing* melalui *balance of power* menjadi pilihan skeptis bagi semua negara. Dengan berakhirnya perang dingin, pandangan terhadap fenomena internasional melalui konsep *balance of power* turut berubah ke dalam beberapa bentuk varian strategi *balancing* yang baru. Negara justru mengejar strategi keseimbangan secara terbatas dan menghindari konfrontasi militer secara langsung. Pada kondisi demikian pula negara cenderung memiliki dua strategi utama yakni *balancing* atau *bandwagoning* (Walt, 1985).

Dalam tulisan Stephen Walt (1985) yang berjudul “*Alliance Formation and The Balance of Power*” lebih lanjut menjelaskan perihal strategi *balancing* dan *bandwagoning* sebagai langkah strategis dalam menyikapi dinamika persaingan internasional. *Balancing* merupakan strategi atau upaya dimana negara-negara berusaha melakukan penyeimbangan kekuatan terhadap negara dominan atau yang dianggap mengancam kedaulatan maupun stabilitasnya melalui pembentukan aliansi guna menahan dan melawan kekuatan tersebut. Melalui strategi ini, negara

berusaha menciptakan sistem internasional yang lebih seimbang dan menolak bentuk intervensi yang lebih dari negara mana pun. Sebagai contoh pembentukan koalisi Prancis, Jerman, dan Rusia terhadap invasi AS ke Irak pada tahun 2003 di forum PBB (Paul T. , 2005).

Sedangkan strategi *bandwagoning* merupakan langkah sebaliknya. Tidak semua negara memiliki kemampuan dan kemauan untuk berada pada posisi berimbang. Pembacaan terhadap kemampuan negara maupun rekan sekutu yang akan diandalkan tentu menjadi poin pertimbangan yang besar dalam hal ini, sehingga *bandwagoning* merupakan strategi yang diambil sebagai pilihan. *Bandwagoning* diartikan sebagai langkah untuk mengikut pada negara dominan sebagai bentuk untuk bertahan maupun mendapat keuntungan. Dalam strategi ini, negara cenderung bersekutu dengan negara dominan sebagai bentuk preventif guna menghindari konflik atau bahkan mendapatkan perlindungan dan akses terhadap sumber daya atau pengaruh politik.

Selanjutnya Kai He dan Feng (2008) dalam karyanya yang berjudul "*If Not Soft Balancing, Then What? Reconsidering Soft Balancing and U.S Policy toward China*" menjabarkan terdapat 4 jenis tindakan balancing yang bisa dilakukan oleh sebuah negara; (i) *military hard balancing*, (ii) *non-military hard balancing*, (iii) *military soft balancing*, dan (iv) *non military soft balancing*.

Tabel 2. 1 The Typology of State Balancing Strategies

Definition	Military	Non-Military
Hard Balancing (increase a state's own power versus rivals)	Military hard balancing <ul style="list-style-type: none"> • internal military balancing: arms races, military mobilization • external military balancing: alliance formation 	Non-Military hard balancing <ul style="list-style-type: none"> • strategic technology transfer to its allies • strategic economic aid to its allies
Soft Balancing (undermine the rival's relative power to increase security)	Military soft balancing <ul style="list-style-type: none"> • arms sales to the "enemy of the enemy" • arms control efforts targeting the enemy 	Non-military soft balancing <ul style="list-style-type: none"> • economic sanctions and embargo • strategic non-cooperation

Sumber ; (He & Feng, 2008)

Military hard balancing merupakan tindakan suatu negara melalui peningkatan kapasitas militernya dan membentuk aliansi dengan negara lain sebagai respon ancaman yang dirasakan guna mencapai keseimbangan. Kemudian, *non military hard balancing* merupakan tindakan yang diambil oleh negara dengan penguatan kapasitas melalui transfer teknologi atau pemberian bantuan kepada negara sekutu untuk mencapai titik stabilitas. Selanjutnya *military soft balancing* merupakan langkah negara untuk melemahkan kekuatan negara pengancam dengan upaya pengendalian senjata yang menargetkan negara pengancam dan penjualan atau pembelian senjata dari rival negara pengancam. Dan yang terakhir *non military soft balancing* merupakan strategi atau upaya yang dilakukan melalui pemberian sanksi ekonomi dan penereapan strategi non kooperasi lainnya untuk melemahkan negara pengancam (Nainggolan, Widodo, Soedarmono, & Utama, 2024).

Dalam sumber yang lain, *Soft Balancing* disebutkan sebagai strategi *balancing* melalui upaya menahan kekuatan dan kebijakan agresif suatu negara melalui pendekatan yang lebih diplomatik dan tidak melibatkan unsur militeristik. Terdapat 4 strategi yang dilakukan oleh sebuah negara dalam upaya penerapan *soft balancing* yaitu, (i) *territorial denial*, atau pembatasan teritorial merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah negara dengan tidak memberikan akses teritorial terhadap negara lain sebagai upaya untuk mengurangi aktivitas/pengaruhnya di kawasan. (ii) *Entangling Diplomacy*, adalah upaya yang dilakukan melalui penggunaan diplomasi untuk menahan kekuatan negara dominan, yang kemudian dapat berupa kerjasama atau perjanjian multilateral. (iii) *Economic Strengthening*, penguatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara atau melalui kerjasama antar negara-negara dengan maksud penguatan ekonomi juga menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara dominan. (iv) *Signals of resolve to balance*, merupakan upaya *soft balancing* yang dilakukan dengan cara pemberian sinyal kepada negara dominan dengan penentangan terhadap kebijakan mereka, baik melalui kerjasama maupun tindakan balasan secara langsung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dominan (Pape, 2005).

Paul turut mengemukakan terdapat 3 opsi yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjalankan strategi *soft balancing* kepada negara target (Paul T. , 2018). Pertama, melalui institusi internasional. Strategi ini digunakan dengan cara memanfaatkan lembaga/institusi internasional untuk menahan

dan membatasi perilaku agresif negara lain. Kedua, aliansi secara informal. Jikalau biasanya aliansi sering dikatkan dengan perjanjian formal, struktur maupun organisasi untuk menaungi kepentingan anggota, aliansi sebagai *soft balancing* bisa dilakukan tanpa adanya komitmen resmi antar negara. Yang terakhir, sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi menjadi strategi untuk mengirimkan sinyal kuat pada negara lawan tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung dan menghemat biaya.

Lebih lanjut Kai He menjelaskan bagaimana kemudian institusi internasional bisa menjadi instrumen dalam strategi *soft balancing* yang kemudian lebih dikenal melalui *intitucional balancing* (He, 2009). Terdapat dua bentuk *institusional balancing*, (i) *inclusive institusional balancing*, dan (ii) *exlusive international balancing*. Secara garis besar, keduanya sama-sama menggunakan institusi internasional untuk mewujudkan keseimbangan sistem internasional. Namun titik perbedaannya adalah di *inclusive institutional* negara membentuk dan bergabung dalam istitusi dengan melibatkan kekuatan yang bersaing dengan tujuan untuk mengelola dan menghambat dominasi kekuatan dari dalam institusi tersebut. Sementara dalam *exlusive institutional* negara membentuk institusi yang mengecualikan atau menyisihkan kekuatan besar yang dianggap sebagai ancaman guna membentuk koalisi anti-hegemonik (He, 2009).

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, dapat dilihat bagaimana kemudian Republik Rakyat Tiongkok memanfaatkan BRICS sebagai platform *soft balancing*-nya untuk membangun kekuatan dan menyaingi

dominasi AS di Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Paul dan Pape dalam tulisannya, perihal bagaimana institusi internasional dimanfaatkan sebagai strategi *soft balancing* untuk menandingi atau menahan dominasi negara lawan. Dan juga penjelasan Kai He, terkait bagaimana kemudian BRICS sebagai platform Tiongkok yang dibentuk tanpa melibatkan AS didalamnya guna menciptakan koalisi anti-hegemonik. Dalam posisi ini BRICS sebagai *exlusive institutional balancing*.

Terlihat jelas bagaimana selama ini Tiongkok memanfaatkan forum internasional seperti BRICS guna mengimbangi dan membangun kekuatan untuk menyaingi dominasi AS. Hal ini jelas menjadi strategi cerdas mengingat di lain sisi Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kekuatan agregat sehingga menjadi lawan yang kuat (Walt, 1985). Strategi Tiongkok jelas lain dan tidak bukan untuk menghindari konfrontasi langsung dengan AS, mengingat lagi-lagi AS merupakan negara *great power* yang hadir pasca perang dingin. Sehingga konsep *soft balancing* ini sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis strategi *soft balancing* Tiongkok melalui BRICS untuk meraih pengaruh dan membangun kekuatan di Kawasan Asia Tenggara.

B. Teori Stabilitas Hegemoni

Hegemoni berasal dari kata Yunani “hegemon” (pemimpin yang tidak terkalahkan). Hegemon adalah negara yang memiliki keunggulan hampir di semua sektor, baik militer, ekonomi dan politik atas negara lain dalam

sistem internasional. Kepemilikan kendali terhadap bahan mentah, kendali atas sumber modal, kendali atas pasar dan keunggulan kompetitif dalam memproduksi barang-barang bernilai tinggi merupakan suatu hal yang harus dicapai oleh sebuah negara untuk menjadi hegemon (Keohane, 1984)

Sistem internasional akan relatif stabil ketika terdapat satu negara dominan (hegemon) yang memiliki kemampuan dan bersedia menciptakan dan menegakkan aturan-aturan sistem internasional (Gilpin, 1981). Tatanan internasional cenderung stabil ketika terdapat kepemimpinan dari sebuah negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan militer yang dominan. Hegemon memainkan peran sebagai penyedia layanan publik internasional seperti, keamanan, stabilitas ekonomi, dan tatanan institusi internasional.

Sistem internasional yang anarki diwarnai dengan persaingan oleh negara sebagai aktor rasional. Dengan upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya negara bahkan bisa berperang dengan negara lain, hal ini sebagai konsekuensi logis akibat ketiadaan otoritas global sehingga dunia internasional dilihat sebagai medan persaingan (Waltz, 1979). Sehingga kehadiran negara hegemon dianggap sebagai solusi alternatif untuk menciptakan dunia internasional yang cenderung stabil (Gilpin, 1981).

Ketiadaan pemimpin hegemonik dapat menjadi asal muasal krisis global (Kindleberger, 1973). Kehadiran pemimpin hegemonik diartikan sebagai wujud pembentukan sistem internasional yang stabil dan teratur. Lebih lanjut Kindleberger menjabarkan terdapat lima tanggungjawab yang dimiliki oleh sebuah hegemon dalam ruang global; (i) menjaga pasar

terbuka bagi ekspor negara lain, (ii) menyediakan likuiditas internasional ketika diperlukan, (iii) menstabilkan nilai tukar mata uang dunia, (iv) mengkoordinasikan kebijakan ekonomi internasional, dan (iv) menjaga sistem perdagangan internasional tetap terbuka (Kindleberger, 1973).

Krisis ekonomi global pada tahun 1930-an disebabkan oleh tidak adanya negara yang bersedia untuk memimpin ekonomi internasional. Amerika Serikat sendiri yang dinilai telah memiliki kemampuan ekonomi yang mapan menolak tanggungjawab tersebut dan sebaliknya justru mengeluarkan kebijakan proteksionisme, membatasi arus modal, dan menolak memberikan bantuan internasional sehingga kemudian kondisi ini memperparah krisis global pada saat itu (Kindleberger, 1973). Sebagai kesimpulan, Kindleberger menyatakan bahwasanya stabilitas ekonomi global tidak akan terjaga dengan baik tanpa adanya negara yang berperan sebagai hegemon.

Kemudian, hal lain yang dapat mempengaruhi kestabilan global adalah ketika terdapat negara pesaing (*hiring power*) yang menantang dominasi global, bahkan dapat membuka keran perubahan sistemik yang mendalam (Gilpin, 1981). Apabila terjadi pergeseran distribusi kekuatan di antara negara-negara besar, maka besar kemungkinan untuk membawa perubahan pada tatanan internasional. Selain daripada itu kehadiran negara pesaing ini juga berpengaruh pada pola atau perilaku negara-negara lain yang menjadi subjek dari persaingan hegemoni antara hegemon secara status quo dan pesaingnya.

Dalam kaitannya, Tiongkok melalui BRICS berperan sebagai *challenger* atau negara baru yang muncul untuk menantang hegemon AS secara status quo. Seperti yang diketahui bersama, pasca perang dingin sistem dunia beralih dari bipolar menjadi unipolar dengan menghadirkan AS sebagai negara adikuasa. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menandai berdirinya AS sebagai satu-satunya hegemon global. Namun kepemimpinan AS sebagai hegemon global dikabarkan mulai terkikis secara berangsur-angsur selama dua dekade belakangan (Saputra, 2021).

Kondisi demikian kemudian mempengaruhi stabilitas Kawasan Asia Tenggara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun keamanan. Kebangkitan Tiongkok sejak abad 21 dan muncul sebagai satu-satunya pesaing yang strategis membuat AS sadar akan tergesernya pengaruh dan dominasi AS di regional kawasan Indo Pasifik, terkhusus di wilayah Asia Tenggara. Akibat kondisi ini menjadi medan adu kekuatan dan persaingan antar kedua negara, tidak hanya dalam bidang teknologi dan pengaruh ekonomi, bahkan sesekali mengalami gesekan yang signifikan. Hal ini tentu membuat negara-negara di kawasan menjadi dilema untuk menentukan keberpihakan ke salah satu pihak atau tetap pada prinsip netralitas yang dimiliki ASEAN.

Posisi Tiongkok yang memilih untuk tidak tunduk pada aturan UNCLOS 1982 dalam isu Laut Cina Selatan dan tetap bertahan pada argumen bahwa Kawasan tersebut merupakan kepimilikan dari wilayah teritorialnya dengan landasan *nine dash line* jelas menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh negara ini. Ketidakmampuan PBB sebagai organisasi internasional

dalam menegakkan aturan ini dalam konflik laut cina selatan kiranya memberikan kita gambaran bagaimana kekuatan yang dimiliki Tiongkok. Dan dalam hal ini semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai *challenger* atau hegemon baru di Kawasan ini.

Teori ini sangat relevan dalam menganalisis dinamika kontemporer antara AS sebagai hegemon global dan Tiongkok sebagai kekuatan yang naik daun. Tiongkok melalui forum multilateral BRICS berupaya menantang dominasi barat dalam sistem internasional dengan membangun alternatif institusional, keuangan dan politiknya. Melalui BRICS, Tiongkok memperluas pengaruhnya di negara-negara *global south*, termasuk di kawasan asia tenggara, dan kemudian menawarkan tatanan dunia yang dianggap lebih seimbang, multipolar, dan tidak dikendalikan oleh dominasi dan nilai-nilai barat.

Persaingan yang hadir oleh kedua kekuatan besar ini di kawasan Asia Tenggara menimbulkan dilema oleh negara-negara anggota dan menciptakan gejolak stabilitas kawasan dan menuntut untuk negara mengambil tindakan yang tepat untuk menyikapi hal demikian. Hal ini sejalan dengan teori ini, dimana AS berperan sebagai hegemon di kawasan (secara status quo) dengan Tiongkok hadir sebagai *challenger* yang mencoba menantang hegemoni AS di Kawasan Asia Tenggara yang kemudian akan menciptakan instabilitas di Kawasan.

Dalam penelitian ini, teori ini akan mengantarkan kita untuk melihat perilaku negara-negara asia tenggara yang dihadapkan pada posisi dilema,

antara tetap berada pada orbit pengaruh AS, atau beradaptasi dan mengikuti pada dominasi baru (Tiongkok), atau tidak pada keduanya dan memilih untuk memanfaatkan rivalitas ini untuk mendapat keuntungan yang signifikan. Teori stabilitas hegemoni yang dipaparkan oleh Gilpin dan Kindleberger dapat digunakan untuk melihat dampak persaingan kedua kekuatan ini dan respon negara-negara Asia Tenggara dalam melihat fenomena persaingan hegemoni ini.

C. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur mengenai Persaingan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok secara khusus kebanyakan hanya berfokus pada kebijakan langsung antar kedua negara. Kebanyakan diantaranya langsung menganalisis persaingan kedua negara melalui kebijakan luar negeri masing-masing negara. Tidak hanya itu, persaingan dua kekuatan ini juga masih banyak difokuskan pada Kawasan Indo Pasifik secara umum, namun masih minim dalam fokus Asia Tenggara secara khusus. Akan tetapi, dalam penelitian ini turut menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber atau acuan dalam penelitian guna dapat melihat persamaan dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa literatur atau penelitian yang memiliki kesamaan dan menjadi acuan dalam penulisan, sehingga melalui ini akan dijabarkan secara singkat terkait penelitian yang digunakan.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Achmad Alfaron Alamsyah dalam Jurnal Perdagangan Internasional dengan judul “Peran Cina dalam

Mengoptimalkan Kerjasama Ekonomi BRICS untuk Mencapai Tujuan Pembangun Bersama”. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian BRICS yang telah bertransformasi dari “*emerging markets*” menjadi “*new growth market*” dengan Tiongkok yang memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis *south-south cooperation* untuk melihat upaya diplomasi yang dikembangkan oleh Tiongkok dan forum multilateral BRICS guna mencapai tujuan bersama tersebut.

Secara garis besar, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dijalankan. Penggunaan konsep *south south cooperation* turut digunakan dalam penelitian ini terkait bagaimana Tiongkok melalui BRICS membangun narasi multipolaritas dan membentuk solidaritas negara-negara selatan. Akan tetapi ini tidak menjadi landasan teori dalam penelitian penulis. Selain daripada itu, lanskap penelitian ini yang bersifat global juga menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dijalankan.

Kemudian adapun penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wen Zha dalam jurnal *The Chinese Journal of International Politics* dengan judul “*Southeast Asia amid Sino-US Competition: Power Shift and Regional Order Transition*”. Dalam penelitian mengangkat 4 isu utama terkait; (1) bagaimana keseimbangan kekuatan regional akan bergeser, (2) bagaimana persaingan Tiongkok -AS akan memengaruhi

pilihan strategis negara-negara asia tenggara, (3) peran ASEAN dalam tatanan regional, dan (4) bagaimana tatanan regional akan berevolusi.

Penelitian ini menjadi acuan dalam penulis untuk melihat bagaimana prospek persaingan dari kedua kekuatan ini di Kawasan asia tenggara dan juga dalam melihat bagaimana respon negara-negara asia tenggara terhadap persaingan dua kekuatan ini. Namun perbedaannya adalah terkait bagaimana kemudian BRICS digunakan oleh Tiongkok sebagai salah satu instrumen *soft balancing* nya dalam menandingi dominasi AS.